

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Mahrus, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press.

Arief, Barda Nawawi, 2012, *Kebijakan Formulasi: Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang: CV Elangtuo Kinasih.

Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Arsyad, Jawade Hafidz, 2015, *Korupsi dalam Prespektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. I*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Chawazi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pres.

Hamel, Van di dalam Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangka Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

Hamzah, Andi, 1990, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Idris, Fahmi, 2012, *Selamatkan Uang Negara dengan Tata Kelola Keuangan Negara yang Benar*, Jakarta: Expese.
- Jahja, Juni Sjafrien, 2017, *Say No To Korupsi*, Jakarta: Visimedia.
- Jahja, Juni Sjafrien, 2017, *Say No To Korupsi: Mengenal, Mencegah & Memberantas Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2016, *Politik Hukum*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kasiyanto, Agus, 2018, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan, 2006, *Memahami untuk Membasmi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P.A.F, 1991, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Pionir Jaya.
- Lamintang, 2005, P.A.F. dikutip oleh John Paulus Pile Tukan, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Anak Korban Pencabulan*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Minarno, Nur Basuki, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pujiyono, 2017, *Tindak Pidana Korupsi*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Raghib, H.M. Rasyid Ariman & Fahmi , 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Salama, Nadiatus, 2010, *Fenomena Korupsi Indonesia: Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo.
- Saleh, Roeslan, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, Ibnu, 2011, *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Santoso, Prayitno Iman, 2015, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni.
- Schaffmeister, dkk., 2003, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Liberty sebagaimana diterjemahkan oleh Sahetapy.

- Simons dalam Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- Soedarto, 2009, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip.
- Soedarto, 2018, *Hukum Pidana I (Cetakan Kelima)*, Semarang: Yayasan Soedarto.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1981, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R., 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Politeia.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Suharto, 1993, *Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Objek Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Taufi, Galang dan Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Wiyono, R., 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yunara, Edi, 2012, *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal Ilmiah

Hananta, Dwi, 2018, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 7, No 1, Pengadilan Negeri Kediri.

Iqbal, Muhamad, 2019, *Efektivitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoaks Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia*, Jurnal Vol 3 No 2, Literasi Hukum.

Revida, Erika, 2003, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*, Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dokumen

Laporan hasil audit BPK No: 64/LHP/XV/12/2013 tanggal 20 Desember 2013.

Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Banding dalam *Proyek Hambalang, v. Andi Alfian Malaranggeng*, Nomor 57/Pid/TPK/2014/PT.DKI.

Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Banding dalam *Suap Wisma Atlet SEA Games Palembang v. Wafid Muharram*, Nomor 7/Pid.B/TPK/2012/PT.DKI.

Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi dalam *Proyek Hambalang, v. Andi Alfian Malaranggeng*, Nomor 2427 K/Pid.Sus/2015.

Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi dalam PT Bank Century, Tbk v. Budi Mulya, Nomor 861 K/Pid.Sus/2015.

Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Pertama dalam *Suap Wisma Atlet SEA Games Palembang v. Wafid Muharram*, Nomor 48/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi dalam *Suap Wisma Atlet SEA Games Palembang v. Wafid Muharram*, Nomor 1393K/Pid.Sus/2012.

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst

Skripsi dan Disertasi

Abidah, Shofriya Qonitatin, 2020, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Indonesia Dalam Penyebarluasan Konten Bermuatan Kesusilaan Melalui Saran Elektronik*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Arsil, 2013, *Bahan Presentasi FGD Studi Tentang Disparitas Putusan Dalam Perkara Korupsi – ICW*, Jakarta: Gren Alia.

Larasati, Eki Putri, 2013, *Skripsi Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Minimum Khusus*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Wawancara

Barda Nawawi Arief, *Wawancara*, Guru Besar Hukum Pidana, (Semarang, 1 April 2022).

Sugali, *Wawancara*, Advokat Kantor Hukum Sugali SH., M.H. & Rekan, (Cirebon, 7 Maret 2022).

Internet

Antaranews.com. 2021. *Menyorot Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Yang Melorot*. Diakses pada tanggal 15 Januari 2022 dari

<https://www.antaranews.com/berita/1974114/menyorot-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-yang-melorot>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadaan>, diakses tanggal 18 Mei 2022.

BBC.com. 2020. *Pukat UGM: Dana Bansos rawan dikorupsi*. Diakses pada tanggal 15 Desember 2020 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52232496>.

Bbcnews.com. 2021. *Vonis Juliari Batubara: Diringankan karena cacian publik, 'keberpihakan hakim untuk pelaku atau korban pandemi?'*. Diakses pada tanggal 18 Januari 2022 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58320105>.